

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DISERTASI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTARA TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 <i>Gap</i> Penelitian	15
1.3 Rumusan Masalah Penelitian.....	17
1.4 Pertanyaan Penelitian	19
1.5 Tujuan Penelitian.....	20
1.6 Motivasi Penelitian.....	21
1.7 Kontribusi Penelitian	22
1.8 Ruang Lingkup Penelitian	24
1.9 Konteks Penelitian.....	30
1.9.1 Desentralisasi Fiskal dan Korupsi Birokrasi	32
1.9.2 Implementasi Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia.....	34
1.10 Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
2.1 Tinjauan Definisi Implementasi Belanja Pemerintah Daerah	39
2.2 Tinjauan Literatur Implementasi Belanja Pemerintah Daerah	42

2.3	Tinjauan Literatur Hambatan Implementasi Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia	49
2.4	Tinjauan Literatur Desentralisasi Fiskal terkait Korupsi.....	52
2.5	Tinjauan Pengertian Korupsi	53
2.5.1	Etimologi Korupsi	53
2.5.2	Terminologi Korupsi	57
2.6	Jenis Korupsi dalam Konteks Implementasi Belanja Pemerintah	60
2.6.2	Korupsi Legislatif.....	64
2.6.3	Korupsi Birokrasi	65
2.7	Tinjauan Korupsi Birokrasi di Indonesia.....	76
2.8	Tinjauan Studi Empiris Belanja Pemerintah dan Korupsi.....	76
2.9	Teori Keagenan dan Korupsi Birokrasi	79
2.10	Tinjauan Perspektif Teori Jaringan-Aktor dan Korupsi	84
2.11	Wewenang dan Kewajiban Aparatur Pemerintah dalam Mekanisme Implementasi Belanja Pemerintah Daerah	88
2.12	Konseptualisasi Implementasi Belanja Pemerintah Daerah	92
BAB III METODA PENELITIAN		97
3.1	Asumsi Filosofis Penelitian.....	97
3.2	Rerangka Kerja Penelitian	100
3.3	Unit Analisis Penelitian	102
3.4	Data dan Sumber Data Penelitian.....	103
3.4.1	Dokumen dan Arsip.....	104
3.4.2	Wawancara	108
3.4.3	Observasi Langsung	113
3.5	Uji Kualitas Rancangan Penelitian: Validitas dan Reliabilitas	114
3.6	Metoda Analisis.....	116
3.6.1	Kompilasi Data	117
3.6.2	Penguraian Data.....	118
3.6.3	Penggabungan Kembali.....	119
3.6.4	Interpretasi	120
3.6.5	Kesimpulan.....	121

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	125
4.1 Deskripsi Data	125
4.1.1 Penentuan Kasus Studi	126
4.1.2 Pengumpulan Data Arsip, Wawancara, dan Observasi Langsung	138
4.1.3 Hasil Uji Validitas	143
4.1.4 Hasil Uji Reliabilitas	146
4.2 Hasil Analisis Data	147
4.2.1 Tindakan Aktor Korupsi	150
4.2.2 Potensi Perilaku Korup Berkelanjutan	173
4.2.3 Hambatan Kinerja	190
4.2.4 Penanganan Korupsi	201
4.3 Pembahasan	218
4.3.1 Tindakan Aktor Korupsi	219
4.3.2 Potensi Perilaku Korup Berkelanjutan	233
4.3.3 Hambatan Kinerja	245
4.3.4 Penanganan Korupsi	249
BAB V SIMPULAN	254
5.1 Simpulan	254
5.2 Implikasi Penelitian	264
5.2.1 Implikasi Teoretis	264
5.2.2 Implikasi Praktis	268
5.3 Keterbatasan dan Saran	271
DAFTAR PUSTAKA	274
Lampiran	291

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Serapan anggaran pemerintah pusat per triwulan tahun 2011-2018	3
Tabel 1.2	Postur serapan anggaran belanja pemda per semester tahun 2011-2019 di Indonesia	6
Tabel 1.3	Tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara	8
Tabel 1.4	Temuan belanja pemda atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	10
Tabel 1.5	Sebaran korupsi ASN di wilayah pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia per 2018.....	11
Tabel 1.6	Tindak pidana korupsi per wilayah di daerah Indonesia.....	12
Tabel 1.7	Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia.....	18
Tabel 2.1	Tinjauan literatur implementasi belanja pemerintah daerah di A.S.	43
Tabel 2.2	Tinjauan literatur implementasi belanja pemerintah di Eropa	45
Tabel 2.3	Tinjauan literatur implementasi belanja pemerintah di negara Afrika	47
Tabel 2.4	Tinjauan literatur implementasi belanja pemerintah secara global	49
Tabel 2.5	Tinjauan literatur hambatan implementasi belanja pemerintah daerah di Indonesia	50
Tabel 2.6	Tinjauan literatur desentralisasi pemerintahan daerah terkait korupsi	54
Tabel 2.7	Tinjauan literatur perkembangan definisi korupsi birokrasi	65
Tabel 2.8	Tinjauan literatur korupsi pada birokrasi publik	71
Tabel 3.1	Kebutuhan data dan sumber data	105
Tabel 3.2	Tahapan identifikasi korupsi birokrasi pada temuan LHP BPK	106
Tabel 3.3	Jabatan dan wewenang – kewajiban implementasi belanja pemda...	110
Tabel 3.4	Penentuan atasan dan bawahan dalam implementasi belanja di pemerintah kabupaten/kota	111
Tabel 3.5	Pertanyaan pemandu dan maksud pertanyaan.....	113

Tabel 3.7	Taktik studi kasus yang relevan untuk uji rancangan penelitian ini .	116
Tabel 3.8	Strategi untuk memverifikasi teori secara empiris.....	117
Tabel 4.1	Demografi dan informasi korupsi terkait penelitian tahun 2019.....	127
Tabel 4.2	Hasil identifikasi korupsi birokrasi pada LHP BPK atas sistem pengendalian internal	129
Tabel 4.3	Hasil identifikasi korupsi birokrasi pada temuan BPK3	137
Tabel 4.4	Realisasi anggaran belanja triwulan pada unit pemda yang menjadi konsentrasi studi.....	139
Tabel 4.5	Informasi utama terkait informan.....	141
Tabel 4.6	Hasil pengodean wawancara	149
Tabel 4.7	Basis kekuatan sosial sebagai penjelas untuk perilaku kepatuhan aparatur pemda bawahan.....	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Masalah kritis pada tahapan implementasi belanja pemerintah pusat	2
Gambar 2.1 Perubahan kata korupsi berdasarkan etimologinya	57
Gambar 2.2 Hubungan perilaku korup dalam masyarakat demokratis.....	61
Gambar 2.3 Keterkaitan pelaku pada jenis-jenis korupsi	62
Gambar 2.4 Hubungan Atasan – Pegawai – Klien	81
Gambar 2.5 Bagan alir implementasi belanja daerah	90
Gambar 2.6 Rerangka konseptual implementasi belanja pemerintah daerah	96
Gambar 3.1 Ilustrasi filosofi penelitian dalam proses penelitian	100
Gambar 3.2 Siklus rancangan penelitian	101
Gambar 3.3 Tahapan identifikasi korupsi birokrasi pada belanja barang/jasa dan belanja modal berdasarkan LHP BPK menggunakan protokol analisis teks	107
Gambar 3.4 Siklus etnografi penelitian	115
Gambar 3.5 Model aliran kode–ke–teori untuk kajian kualitatif.....	120
Gambar 3.6 Siklus analisis penelitian.....	122
Gambar 3.7 Siklus penelitian keseluruhan	124
Gambar 4.1 Visualisasi triangulasi yang telah dilakukan.....	145
Gambar 4.2 Demonstrasi lima tahap yang digunakan untuk menganalisis data wawancara menggunakan NVivo	148
Gambar 4.3 Pengembangan teori berdasarkan perbandingan jumlah referensi pengodean	150
Gambar 4.4 Tema tindakan aktor korupsi berdasarkan hubungan pengodean...	151
Gambar 4.5 Tema tindakan aktor berdasarkan perbandingan jumlah referensi pengodean	173
Gambar 4.6 Tema potensi perilaku korup berkelanjutan berdasarkan hubungan pengodean	174

Gambar 4.7 Implementasi belanja barang/jasa berupa belanja alat tulis kantor di Kabupaten Sleman	182
Gambar 4.8 Implementasi belanja barang/jasa berupa belanja makan dan minum di Kota Yogyakarta	182
Gambar 4.9 Tema potensi perilaku korup berkelanjutan berdasarkan perbandingan jumlah referensi pengodean	190
Gambar 4.10 Pengembangan tema hambatan kinerja berdasarkan hubungan pengodean	191
Gambar 4.11 Pengembangan tema hambatan kinerja berdasarkan perbandingan jumlah referensi pengodean	200
Gambar 4.12 Pengembangan tema penanganan korupsi berdasarkan hubungan pengodean	201
Gambar 4.13 Pengembangan tema penanganan korupsi berdasarkan perbandingan jumlah referensi pengodean	219
Gambar 4.14 Peran korup dan formal aktor dalam implementasi belanja barang/jasa dan belanja modal	221
Gambar 4.15 Hubungan keagenan pemerintahan daerah	231

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Bagian Kunci	291
Lampiran 2. Daftar Singkatan	294
Lampiran 3. Skenario Wawancara	297
Skenario 1. Wawancara terhadap Aparatur Pemerintah Daerah yang Mengimplementasikan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.	298
Skenario 2. Wawancara Terhadap Klien Aparatur Pemerintah Daerah....	303
Skenario 3. Wawancara terhadap Auditor Inspektorat Daerah Terkait Implementasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.....	307
Lampiran 4. Contoh Kertas Kerja Penentuan Korupsi Birokrasi pada Temuan BPK Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	311
Lampiran 5. Contoh Manuskrip Hasil Transkrip Secara Verbatim dan Pengodeannya pada NVivo 12 Plus	322
Lampiran 6. Deskripsi Hasil Kode.....	344
Lampiran 7. Tampilan Kode pada Aplikasi NVivo Plus 12	355